

Pemberdayaan Struktur dan Agen dalam Penanggulangan Kemiskinan Kultural di Desa Tianyar Barat Kabupaten Karangasem Bali

A A Ngurah Anom Kumbara^{1*}, Mayske Rinny Liando²,
Nanang Sutrisno³

^{1,3} Universitas Udayana Bali, Indonesia

² Universitas Negeri Manado, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.24843/JKB.2023.v13.i02.p11>

Abstract

Empowerment of Structures and Agents in Cultural Poverty Alleviation in West Tianyar Village Karangasem Regency Bali

In the last five years, Karangasem Regency has always occupied the top position in the number of poor people in Bali Province. One of the pockets of poverty in Karangasem Regency is West Tianyar Village, Kubu District. In addition to natural and structural factors, cultural factors are the causes of poverty in the village. The purpose of this study is to uncover the determinants of the formation of cultural poverty and find the method of empowerment of the role of structures and agents in poverty reduction in this region. Data was collected through observation, interview, and document analysis techniques. Data is analyzed by structuration theory (agency-structure) as the basis for interpretation. This study found that poverty always involves the circularity of the relationship between natural, structural, and cultural poverty so that it is difficult for people to overcome the conditions of poverty faced. By empowering the role of structures and agents, efforts to solve the problem of cultural poverty in West Tianyar Village can gradually be eliminated.

Keywords: empowerment; role of agents; role of structure; cultural poverty; poverty alleviation

1. Pendahuluan

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2020 menunjukkan bahwa pada lima tahun terakhir, Kabupaten Karangasem selalu menduduki posisi teratas jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali dengan persentase berkisar antara 6% hingga 7% dari jumlah penduduk. Artinya, pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karangasem masih menjadi persoalan serius yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini tidak lepas dari penyebab

* Penulis Koresponden: anom_kumbara@unud.ac.id

Artikel Diajukan: 13 September 2023; Diterima: 8 Oktober 2023

kemiskinan yang begitu kompleks, antara lain kurangnya sumber daya alam (faktor natural), struktur dan infrastruktur sosial yang kurang mendukung, akses modal ekonomi terbatas dan faktor kultural berupa nilai, sikap, dan kebiasaan berfoya-foya, boros dan pragmatis memperburuk kondisi kemiskinan masyarakat (Hadiwigeno dan Pakpahan, 1993; Suparlan, 1988; Harianto, 2014; Adhi, Ardana dan Maduriana, 2016; Sudiarta dan Suardana, 2016).

Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, adalah salah satu kantong penduduk miskin di Kabupaten Karangasem (Tim Penyusun, 2013). Faktor kultural yang berhubungan erat dengan nilai, sikap, dan kebiasaan masyarakat sebagai peminta-minta (gepeng) tampaknya menjadi kendala besar dalam pengentasan kemiskinan di wilayah ini. Studi pendahuluan peneliti menunjukkan berbagai faktor yang berkaitan dengan kemiskinan di Desa Tianyar Barat seperti berikut. Pertama, adanya aktivitas keagamaan masyarakat dengan durasi yang panjang yang disertai dengan aktivitas perjudian, seperti tajen dan ceki. Kedua, kebiasaan keluarga miskin berpesta saat melangsungkan upacara *manusa yadnya*, seperti perkawinan yang kerap mengupah joged bumbung disertai minum-minuman tuak dan arak. Ketiga, banyak warga miskin memilih menjadi gelandangan dan pengemis terutama perempuan dan anak di bawah umur, sebaliknya pihak laki-laki justru tidak bekerja dan mengandalkan ekonomi pada perempuan atau istri.

Keempat, mental individu untuk mendapatkan uang secara instan mengakibatkan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah sering gagal, misalnya, pemberian bantuan bibit babi dan sapi untuk dipelihara dan dikembangkan malah banyak yang dijual. Kelima, mental ingin menunjukkan kemiskinan untuk memperoleh bantuan pemerintah, misalnya bantuan langsung tunai (BLT), beras miskin (raskin), dan sebagainya. Keenam, adanya nilai dan pandangan hidup yang menunjukkan lemahnya motivasi masyarakat untuk keluar dari kondisi kemiskinan, tercermin dari munculnya ungkapan "*nak sugih jak lacur patuh dogen, masih kel pragat ben kompor*". "Artinya orang kaya atau miskin sama saja, ujungnya toh juga akan selesai dengan dibakar kompor".

Atas dasar fenomena tersebut, maka upaya mengungkap dan memahami lebih dalam faktor-faktor budaya yang berkontribusi terhadap kemiskinan di desa ini dan mengembangkan pendekatan model pemberdayaan struktur dan agen dalam penanggulangan kemiskinan kultural sangat penting dan memiliki signifikansi teoritis maupun praxis. Menurut Suparlan (1988, p. xviii), kemiskinan struktural dan budaya kemiskinan sulit dipisahkan ketika orang miskin melestarikan subkultur (kebiasaan) yang membuat mereka nyaman dalam kondisi kemiskinan itu. Dalam hal ini, tradisi-tradisi tertentu berkontribusi terhadap munculnya kemiskinan, bahkan pola kemiskinan

tersebut acap kali terwariskan secara turun-temurun dan bahkan acap kali dengan sengaja dipelihara.

Terkait dengan fenomena tersebut dan menemukan solusinya tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya kemiskinan kultural dan menemukan model pemberdayaan peran struktur dan agen dalam penanggulangan kemiskinan kultural di Desa Tianyar Barat, Kabupaten Karangasem.

2. Kajian Pustaka

Memahami fenomena kemiskinan struktural dan kultural yang relevan dengan penelitian ini, dapat ditelusuri dari disertasi berjudul “Strukturisasi Kemiskinan Masyarakat Pedesaan: Studi di Desa Mulyodadi, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur” oleh Harianto (2014). Studi ini menggambarkan bahwa kemiskinan yang bersifat absolut disebabkan oleh faktor kultural dan struktural. Program penanggulangan kemiskinan terbukti disfungsi untuk mengatasi kemiskinan. Inisiatif yang dikembangkan rumah tangga miskin hanya sekadar bertahan hidup dan gagal untuk keluar dari kondisi kemiskinan yang dihadapi. Rumah tangga miskin usia produktif membutuhkan program penanggulangan kemiskinan yang bersifat produktif, berjangka panjang dan berkelanjutan sehingga pemerintah perlu membuka akses permodalan dan menumbuhkan iklim investasi di wilayah pedesaan. Studi ini tidak menyinggung pendekatan kultural secara mendalam untuk penanggulangan kemiskinan. Walaupun demikian studi tersebut dijadikan komparasi dalam memahami kemiskinan dalam studi ini.

Sudibia dan Marhaeni (2012) melakukan studi berjudul “Beberapa Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali”. Studi ini menggunakan metode kuantitatif menyangkut 90 responden keluarga miskin di Kecamatan Manggis, Karangasem, dan Abang. Strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karangasem dilakukan dengan sistem klaster. Strategi klaster 1 diterapkan kepada masyarakat yang benar-benar miskin berupa pemberian bantuan sosial dan memberikannya pekerjaan. Strategi cluster 2 diterapkan kepada keluarga prasejahtera yang telah memiliki mata pencaharian tetap, tetapi pendapatannya masih kurang. Pada klaster ini, strategi yang digunakan adalah memberikan bantuan modal kerja termasuk pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM). Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang terfokus pada aspek ekonomi dalam melihat persoalan kemiskinan di Kabupaten Karangasem. Penelitian Sudibia dan Marhaeni sama sekali tidak menyinggung aspek kultural baik sebagai penyebab kemiskinan maupun strategi penanggulangannya sehingga mengandung keterbatasan dan berbeda dengan penelitian ini. Walaupun demikian, penelitian tersebut bermanfaat

untuk bahan komparasi dalam memahami kemiskinan di Karangasem.

Studi lainnya dilakukan oleh Adhi, Ardana dan Maduriana (2016) dengan judul “Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan Kultural dan Model Pengentasannya Berbasis Kearifan Lokal: Studi Kasus Pada Masyarakat Miskin di Pegunungan Kintamani, Bangli”. Hasil penelitian Adhi, dkk. menyatakan bahwa kemiskinan kultural dominan terjadi di wilayah Pegunungan Kintamani, Bangli karena faktor kultural, seperti sikap malas, menyerah pada nasib, lebih suka mengemis daripada bekerja, dan kondisi kemiskinan yang dialami turun-temurun. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut antara lain mengembangkan empati dan simpati sosial berbasis kearifan lokal yang menekankan pada solidaritas dan kebersamaan. Program penanggulangan kemiskinan kultural harus berasal dari kebutuhan warga miskin sendiri (*bottom-up*), bukan program ditetapkan dari atas (*top-down*). Penelitian tersebut menjadi referensi penting karena memiliki kesamaan dengan penelitian ini, tetapi ada perbedaannya dalam metode dan strategi di mana studi ini lebih fokus pada upaya pemberdayaan struktur dan agen dalam penanggulangan kemiskinan kultural di Karangasem.

Studi “Dampak Pariwisata Terhadap Kemiskinan di Kawasan Pariwisata di Bali” oleh Sudiarta dan Suardana (2016) mengambil lokus di dua lokasi, yakni Candidasa dan Tulamben, Kabupaten Karangasem. Studi Sudiarta dan Suardana menemukan bahwa pengembangan pariwisata di kedua kawasan tersebut sesungguhnya memberikan dampak positif bagi penciptaan lapangan pekerjaan. Hanya saja, tidak sepenuhnya berhasil mengentaskan masyarakat dari kondisi kemiskinan karena tidak seluruh warga miskin memiliki akses untuk memanfaatkan peluang itu, seperti kendala bahasa, modal, dan etos kerja. Sebaliknya, warga miskin yang berada di wilayah pariwisata tersebut justru terjebak dalam budaya wisatawan, seperti pemuda yang semakin gemar minum-minuman keras dan ke dunia malam, padahal mereka tidak mendapatkan keuntungan finansial dari kegiatan itu. Studi Sudiarta dan Suardana berbeda dengan studi ini, baik dari lokasi, metode maupun fokus kajian di mana studi tersebut sama sekali tidak menyentuh persoalan kemiskinan kultural. Penelitian tersebut berkontribusi untuk komparasi dalam penelitian ini.

Disertasi yang ditulis Pidada (2017) dengan judul “Kemiskinan Kultural Umat Hindu di Kabupaten Karangasem” menemukan bahwa kemiskinan kultural merupakan efek domino kemiskinan ekonomi, rendahnya kesadaran transformatif, hegemoni sistem sosial dan politik, dan disorientasi tradisi keagamaan. Kemiskinan kultural terjadi pada ranah individu, keluarga dan sebagian besar anggota masyarakat. Pada ranah individu meliputi: pasrah menerima takdir, sikap apatis dan pragmatis, serta ketergantungan pada pihak lain. Pada ranah keluarga berbentuk lemahnya perencanaan keluarga,

lebih mengandalkan pekerja perempuan, serta penyimpangan pola konsumsi. Kemiskinan kultural pada ranah sosial mencakup: perasaan termarginalkan, resistensi terhadap upaya pemberdayaan masyarakat, dan kerumunan kontraproduktif. Penelitian Pidada memiliki persamaan, namun juga perbedaan baik dari aspek lokus, metode pendekatan maupun substansi terkait dengan persoalan kemiskinan di Karangasem.

Berbagai studi tentang kemiskinan di atas menunjukkan bahwa kajian spesifik tentang peran struktur dan agen dalam penanggulangan kemiskinan kultural di Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem belum pernah dilakukan sebelumnya. Kendatipun demikian, kajian-kajian tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman bahwa kemiskinan yang terjadi di masyarakat tidak disebabkan oleh faktor tunggal yang berdiri sendiri, tetapi oleh banyak faktor yang saling terkait antarfaktor natural, ekonomi, struktural, kultural dan juga politik. Sehingga upaya menemukan pendekatan model pemberdayaan struktur dan agen dalam penanggulangan kemiskinan sebagai pendekatan alternatif dipandang penting dilakukan.

3. Metode, Konsep, Teori

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang dalam kerangka metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan teori sosial kritis sebagaimana berlaku dalam tradisi kajian budaya kritis. Pendekatan ini memandang bahwa praktik sosial individu maupun kelompok yang tampak di permukaan sesungguhnya menyimpan berbagai ideologi yang beroperasi di balik praktik-praktik sosial tersebut (Lubis, 2015).

Dalam studi ini, peneliti terjun dan berperan langsung dalam pengumpulan data lapangan selama satu bulan (dari awal Juni s.d. awal Juli, 2022). Untuk menghindari bias dan lebih fokus pada masalah penelitian, digunakan alat bantu berupa pedoman wawancara, alat-alat perekam wawancara, dan pendokumentasian data. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumen terkait. Analisis data dilakukan dengan pendekatan etnografi kritis Madison (2012), interpretatif Geertz (1973), dan interpretasi kritis Thompson (2015) untuk menemukan kedalaman makna dari lapisan-lapisan makna yang terkandung dalam struktur budaya setempat yang disampaikan informan. Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles dan Huberman, 1992).

Ketiga tahapan ini dilakukan secara simultan selama proses penelitian sehingga kehadiran peneliti di lapangan menjadi penting agar seluruh data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan reliabilitas, objektivitas

dan validitasnya. Untuk mencapai tujuan dan netralitas, digunakan teknik triangulasi dalam proses observasi, wawancara dan analisis dokumen tersebut. Reduksi data meliputi berbagai kegiatan, yakni penyeleksian, pemfokusan, simplifikasi, penggolongan data, pengutipan informasi dalam wawancara yang memiliki makna subjektif, dan reflektif.

Penafsiran dan penyajian data sementara dilakukan dengan penyusunan teks naratif yang menunjukkan keteraturan, penjelasan, dan alur sebab akibat. Sementara itu, penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan dengan mengintisarikan hasil penelitian dan mencocokkannya dengan sumber-sumber data di lapangan yang diperoleh dari informan terdahulu dan melakukan korespondensi dengan peneliti yang berkompeten tentang studi kemiskinan.

3.2 Konsep Kemiskinan Kultural

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya guna mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar dimaksud antara lain: (a) kebutuhan pangan, (b) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; (c) rasa aman dari perlakuan ataupun ancaman tindak kekerasan, dan (d) berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Kemiskinan dalam perspektif ekonomi didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Sumber daya dimaksud bukan saja pada aspek finansial, melainkan juga semua jenis potensi untuk meningkatkan kesejahteraan. Indikator kemiskinan yang bersifat material, antara lain kepemilikan harta benda, pendapatan per kapita, dan kemampuan konsumsi. Kemiskinan dalam perspektif kesejahteraan sosial merujuk pada keterbatasan individu atau kelompok dalam mengakses jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas (Bappenas, 2004).

Konsep kemiskinan kultural pertama kali diperkenalkan oleh Oscar Lewis yang memandang bahwa kemiskinan dapat muncul sebagai akibat nilai-nilai dan kebudayaan yang dianut oleh kaum miskin itu sendiri (Effendi, 1992, p.30). Menurut Lewis, "budaya kemiskinan menunjukkan elemen-elemen budaya yang umum di kalangan orang-orang miskin dalam berbagai masyarakat yang berbeda". Lewis melihat kemiskinan sebagai cara hidup atau kebudayaan yang unit sasarannya adalah keluarga sebagai satuan sosial terkecil dan pranata sosial yang mendukung budaya kemiskinan (Suparlan, 1988, p. xviii). Dengan kata lain, kemiskinan kultural dan budaya kemiskinan sulit dipisahkan karena orang-orang miskin melestarikan subbudaya (kebiasaan-kebiasaan) yang membuat mereka nyaman berada dalam kondisi kemiskinan itu.

Budaya kemiskinan merupakan suatu cara yang dipakai oleh orang miskin untuk beradaptasi dan bereaksi terhadap posisi mereka yang terpinggirkan dalam struktur masyarakat kapitalis. Budaya kemiskinan merupakan desain kehidupan orang miskin sebagai upaya memecahkan berbagai problema kehidupan mereka yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya kemiskinan menandai situasi masyarakat yang terjatuh dalam lingkungan sosial apatis, fatalis, dan kurang aspiratif, serta keprihatinan eksklusif yang berkaitan dengan kepuasan sebatas dan seringkali membenarkan perilaku kejahatan (Ancok, 1995, p. 165). Segi kultural mendekati masalah kemiskinan pada tiga ranah analisis, yaitu individual, keluarga, dan masyarakat. Pada tingkat individu, kemiskinan ditandai dengan sifat *a strong feeling of marginality*, seperti sikap malas, apatis, fatalis, pasrah, boros, dan tergantung. Pada tingkat keluarga, kemiskinan ditandai dengan jumlah anggota keluarga yang besar dan perkawinan usia dini. Pada tingkat masyarakat, kemiskinan ditandai tidak terintegrasinya kaum miskin ke dalam institusi-institusi masyarakat secara efektif. Masyarakat miskin kerap mendapat perlakuan sebagai objek yang perlu digarap, daripada sebagai subjek yang perlu diberikan peluang untuk berkembang (Usman, 2004, p.128).

Kemiskinan kultural juga diartikan sebagai kemiskinan yang diakibatkan gaya hidup, perilaku, atau budaya individu/kelompok yang mendorong terjadinya kemiskinan (Tim penyusun 2013, p. 4). Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang muncul akibat nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut orang-orang miskin, seperti malas, menyerah pada nasib, tidak memiliki etos kerja, dan sebagainya. Menurut Lewis (Tim penyusun, 2013, p. 5), kemiskinan kultural terdiri atas nilai, sikap, dan pola kelakuan yang kurang adaptif terhadap lingkungan, menerima kondisi hidup serba kekurangan, dan melahirkan sikap diskriminasi, ketakutan, kecurigaan, serta apatisisme.

Kemiskinan kultural bersifat makro dan fundamental yang berdampak negatif pada perkembangan sosial budaya masyarakat dan penurunan kepercayaan terhadap agama. Dampak negatif tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap pola hidup masyarakat yang hedonis dan konsumeristis. Jadi, kemiskinan kultural berkaitan erat dengan kebudayaan masyarakat. Oleh karena kemiskinan kultural mencakup kemiskinan secara fundamental dalam bentuk sifat, sikap dan perilaku dalam berinteraksi baik antar individu, kelompok, dan masyarakat, maka strategi dan upaya penanggulangannya dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi struktur dan agen yang dimiliki oleh masyarakat bersangkutan.

3.3 Teori Strukturasi sebagai Landasan Analisis

Inti konseptual teori strukturasi terletak pada pemikiran tentang tentang struktur, sistem dan dwi rangkap struktur, di mana integrasi struktur dan agen menjadi konsep kunci dalam teori strukturasi Anthony Giddens (Kumbara, 2003, p. 95). Struktur didefinisikan sebagai properti-properti yang berstruktur sebagai aturan dan sumber daya, di mana struktur hanya ada di dalam dan melalui aktivitas agen manusia. Praktik sosial terjadi di sepanjang ruang dan waktu, tidak karena kekangan struktur dan tidak juga karena peran agen, tetapi karena kedua-duanya saling terjalin dan terkait.

Berkaitan dengan hal tersebut, Giddens (2010, p. 5) mengembangkan pola stratifikasi yang melibatkan pembicaraan tentang monitoring refleksif atas tindakan, rasionalisasi, dan motivasi tindakan sosial sebagai rangkaian proses yang melekat. Model stratifikasi ini beroperasi dalam 6 [enam] elemen teori strukturasi, yakni (1) agen dan agensi; (2) agensi dan kekuasaan; (3) struktur dan strukturasi; (4) dualitas struktur; (5) bentuk-bentuk institusi; serta (6) waktu, tubuh, dan perjumpaan.

Pertama, agen dan agensi. Menurut Giddens monitoring refleksif atas tindakan menjadi unsur tetap tindakan sehari-hari yang melibatkan perilaku individu sekaligus individu-individu lain. Para aktor memonitor arus aktivitasnya, dan berharap aktor-aktor lain juga memonitor aktivitasnya. Aktor secara rutin memonitor aspek-aspek lain yang diciptakan oleh struktur tempat mereka bergerak, melakukan rasionalisasi tindakan, dan mempertahankan suatu pemahaman teoritis secara terus-menerus tentang landasan-landasan aktivitas mereka secara diskursif. Monitoring refleksif berbeda dengan rasionalisasi tindakan menurut motivasinya. Motivasi mengacu pada potensi tindakan, bukan pada cara tindakan yang dilakukan terus-menerus oleh agen bersangkutan. Motif-motif cenderung berhubungan langsung dengan tindakan hanya dalam keadaan-keadaan yang tidak lazim atau situasi-situasi yang terputus dari rutinitas. Tindakan muncul berdasarkan motif-motif yang cenderung didorong oleh kesadaran praktis (Giddens, 2010:7—10).

Agensi berkaitan dengan kejadian-kejadian yang melibatkan individu sebagai pelaku. Agensi melibatkan diri lebih jauh pada konsekuensi tindakan tidak disengaja, berbeda dengan monitoring refleksif dan rasionalisasi yang dijelaskan sebagai tindakan kesengajaan. Konsekuensi-konsekuensi tidak disengaja dari tindakan membentuk kondisi-kondisi terkenal dari tindakan selanjutnya dalam satu siklus (perputaran kausal) umpan balik non-refleksif. Konsekuensi-konsekuensi tidak disengaja itu secara rutin disebarluaskan sebagai sebuah hasil tidak terelakkan dari perilaku rutin yang secara refleksif tetap dipertahankan oleh pelakunya. Hal ini menegaskan bahwa setiap tindakan sosial melahirkan konsekuensi-konsekuensi, baik disengaja maupun

tidak disengaja yang seluruhnya dirutinisasi dalam waktu dan ruang sosial.

Kedua, agensi dan kekuasaan. Hubungan agensi dan kekuasaan diandaikan bahwa seorang agen harus mampu menggunakan sederet kekuasaan kausal secara rutin dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mempengaruhi kekuasaan-kekuasaan orang lain. Menurut Giddens (2010, p. 23, p. 25), kekuasaan dalam sistem sosial memiliki suatu kontinuitas di sepanjang ruang dan waktu yang mengandaikan rutinisasi relasi-relasi kemandirian dan ketergantungan di antara para aktor atau kelompok dalam konteks interaksi sosial. Ini berarti bahwa dalam agensi, kekuasaan lebih besar dimiliki agen berupa kemampuan menciptakan perubahan dalam kehidupan sosial, bahkan agen tidak akan berarti apa-apa tanpa kekuasaan. Dengan kata lain, aktor berhenti menjadi agen, bila ia kehilangan kemampuan melakukan perubahan (Ritzer dan Goodman, 2004, pp. 509-512).

Ketiga, struktur dan strukturasi. Giddens (2010, p. 40) menjelaskan 'struktur', 'sistem', dan 'strukturasi' yang berbeda dengan strukturalis. Struktur dijelaskan adalah aturan dan sumber daya, atau seperangkat relasi transformasi, terorganisasi sebagai kelengkapan-kelengkapan dari sistem-sistem sosial. Sementara itu, sistem adalah relasi-relasi yang direproduksi di antara para aktor atau kolektivitas, terorganisasi sebagai praktik-praktik sosial reguler. Berikutnya, strukturasi adalah kondisi-kondisi yang mengatur keterulangan atau transformasi struktur-struktur, dan karenanya adalah reproduksi sosial itu sendiri. Dengan demikian, menganalisis strukturasi dari sistem-sistem sosial berarti mempelajari cara-cara bagaimana suatu sistem yang tertanam dalam aktivitas-aktivitas aktor tertentu yang berpegang pada aturan-aturan dan sumber daya-sumber daya dalam beragam konteks tindakan, diproduksi dan direproduksi dalam interaksi.

Keempat, dualitas struktur. Menurut Giddens (2010, pp. 40–43), agen dan struktur bukan dualisme, melainkan dualitas. Artinya, kelengkapan-kelengkapan struktural dari sistem sosial adalah sarana sekaligus hasil dari praktik-praktik yang terorganisasi secara rutin. Reifikasi relasi-relasi sosial atau naturalisasi diskursif terhadap keadaan-keadaan sejarah yang berubah-ubah dan produk-produk tindakan manusia merupakan salah satu dimensi utama ideologi dalam kehidupan sosial. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa dualitas struktur merupakan landasan utama bagi keterulangan-keterulangan dalam reproduksi sosial di sepanjang ruang-waktu.

Kelima, bentuk-bentuk institusi. Pembahasan Giddens (2010, p. 45) tentang institusi-institusi berkaitan dengan kekuasaan dan struktur. Dalam hal ini, Giddens (2010, pp. 49–54) mengemukakan tiga dimensi struktural dalam sistem sosial, yaitu signifikansi, dominasi, dan legitimasi yang dipahami dalam

skema interpretatif. Struktur signifikansi memproduksi institusi tanda yang menjadi sarana dan hasil dari proses-proses komunikasi agen dalam interaksi. Struktur-struktur signifikansi selalu harus dipahami dalam kaitannya dengan dominasi dan legitimasi. Dominasi merupakan kondisi keberadaan kode-kode signifikansi, di mana kekuasaan dan dominasi tidak terpisahkan dalam asosiasi sosial. Dominasi tergantung pada mobilisasi dua jenis sumber daya, yaitu sumber daya alokatif yang memproduksi institusi ekonomi, dan sumber daya otoritatif yang memproduksi institusi politik.

Keenam, waktu, tubuh, dan perjumpaan. Menurut Giddens (2010, pp. 55-57), waktu berulang institusi-institusi merupakan kondisi dan hasil dari praktik sosial yang terorganisasi dalam perulangan kehidupan sehari-hari, bentuk substantif dari dualisme struktur. Pewarisan institusi sosial lintas-generasi harus dipahami dalam sejarah, yakni dimensi perulangan waktu. Berikutnya, Giddens (2010, p. 112) menjelaskan integrasi sosial sebagai sistem dalam keadaan-keadaan perjumpaan, yaitu (a) perjumpaan-perjumpaan dibentuk dan dibentuk kembali dalam durasi keberadaan sehari-hari; (b) mekanisme dualitas struktur sebagai sarana dan persinggungan kesadaran diskursif dan kesadaran praktis terorganisasi di dalam dan melalui perjumpaan; dan (c) perjumpaan-perjumpaan dipelihara melalui pembicaraan sehari-hari.

Berdasarkan keenam postulat teori strukturasi di atas dapat dipahami bahwa kemiskinan kultural direproduksi melalui interaksi dinamis antara agen dan struktur. Kemiskinan kultural berlangsung dalam tindakan agen sehari-hari yang melibatkan kesadaran diskursif dan kesadaran praktis. Kemudian, agen secara aktif mengkomunikasikan tindakannya ke dalam struktur melalui kekuasaan tanpa dominasi dan naturalisasi diskursif sehingga mendorong terjadinya transformasi struktur (strukturasi). Dengan demikian, struktur menjadi medium sekaligus hasil dari tindakan agen yang dirutinisasi melalui perjumpaan-perjumpaan, yakni keseluruhan interaksi sosial dalam skema interpretatif.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Faktor Determinan Kemiskinan Kultural dan Struktural di Tianyar Barat

4.1.1 Efek Domino Kemiskinan Natural dan Ekonomi

Terjadinya kemiskinan kultural dan struktural di desa Tianyar Barat Kabupaten Karangasem merupakan efek domino dari kemiskinan natural yang diakibatkan oleh letusan Gunung Agung pada tahun 1963 yang kemudian berlanjut dengan adanya peristiwa politik Garkan Satu Oktober (Gestok) tahun 1965 yang di samping meluluhlantakkan infrastruktur dan pemukiman penduduk, juga menghancurkan berbagai tatanan sosial dan ekonomi

kemasyarakatan. Kedua tragedi tersebut menjadi efek domino terjadinya peningkatan jumlah masyarakat miskin di hampir seluruh desa yang ada di Kabupaten Karangasem.

Terkait dengan peristiwa tersebut, *Tribun Bali* (15 September 2017) menyajikan data bahwa letusan dahsyat Gunung Agung 1963 yang berlangsung dua kali dalam satu periode letusan itu, telah merenggut 1.148 korban jiwa dan 296 luka-luka. Bahkan, dalam laporan yang dibuat Kepala Bagian Vulkanologi Direktorat Geologi Djajadi Hadikusumo kepada UNESCO, letusan itu telah menewaskan 1.549 orang, sekitar 1.700 rumah hancur, 225.000 jiwa kehilangan mata pencaharian, dan sekitar 100.000 jiwa harus dievakuasi dari zona bahaya. Dampak susulan berupa banjir lahar menghancurkan perkampungan di lereng selatan Gunung Agung dan menewaskan 200 orang. Delapan jembatan hancur dan Karangasem terisolasi total sehingga pasokan bahan pangan dan obat-obatan terpaksa dikirimkan melalui jalur laut. Tidak hanya di Karangasem, juga bencana tersebut melanda seluruh Pulau Bali bahwa sebanyak 316.518 ton produksi pangan hancur.

Pemulihan ekonomi pasca-letusan Gunung Agung 1963 tampaknya bergerak melambat dan belum mampu meningkatkan taraf hidup warga miskin di Kabupaten Karangasem. Hal ini dapat dilihat dari data Bappeda Tk. I Bali Tahun 1989 (dalam Mantra, 1993) tentang Indeks Mutu Hidup (IMH) masyarakat Kabupaten Karangasem pada tahun 1985 adalah 56,05 dan tahun 1987 adalah 62,89. Padahal, tahun 1985, IMH penduduk Provinsi Bali sudah berada di angka 70,62 dan meningkat pada tahun 1987 menjadi 76,80. Angka tersebut juga menempatkan IMH penduduk Kabupaten Karangasem sebagai terendah kedua di Provinsi Bali atau setingkat lebih tinggi dari Kabupaten Bangli. Artinya, dalam rentang waktu 20 tahun pasca-letusan Gunung Agung 1963 dan Gestok 1965, IMH masyarakat Karangasem masih terbilang rendah, mengalami perlambatan dibandingkan wilayah kabupaten lainnya di Bali (Pidada, 2017).

Kondisi kemiskinan ekonomi tersebut menjadi realitas kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat miskin di Kabupaten Karangasem dari waktu ke waktu. Tidak sedikit ditemukan penduduk miskin yang kondisinya benar-benar parah, bahkan untuk sekadar memenuhi kebutuhan makan pun tidak mampu sehingga hanya bergantung pada pemberian orang lain. Potret kemiskinan dan ketergantungan yang dialami penduduk Desa Tianyar Barat (Foto 1).

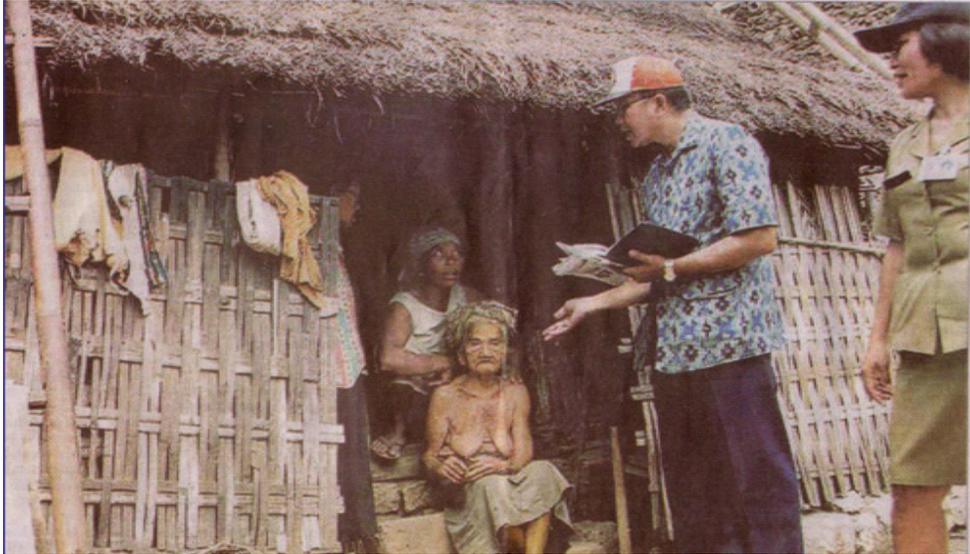


Foto 1. Potret keparahan kemiskinan di Kabupaten Karangasem (Foto: dokumentasi Kumbara, 2022).

Foto 1 menunjukkan kondisi keparahan kemiskinan dari salah satu warga miskin di wilayah Desa Tianyar. Tampak bahwa dalam rumah yang tidak layak huni tersebut tinggal dua orang perempuan lanjut usia yang dikunjungi oleh pegawai Dinas Sosial untuk mendata dan menyalurkan bantuan dana sosial. Dalam penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa kedua perempuan tersebut merupakan ibu dan anak yang sebelumnya hanya bertahan hidup dari buruh serabutan dan menjual hasil kebunnya, seperti pepaya dan nangka ke pasar. Namun, setelah sang ibu menua dan tidak mampu lagi bekerja, maka anak perempuannya itulah yang menanggung semua beban keluarga. Dengan penghasilan yang tidak menentu setiap harinya, maka mereka kerap menggantungkan diri pada bantuan pemerintah dan tetangga sekitar untuk bertahan hidup.

Sementara itu, perencanaan keluarga menjadi efek ikutan lainnya dari kondisi kemiskinan yang dihadapi penduduk karena sulitnya mengakses hiburan. Dengan kondisi kemiskinan yang dihadapi, seks menjadi satu-satunya hiburan yang paling niscaya bagi warga miskin sehingga memiliki banyak anak dengan jarak kelahiran berhimpitan menjadi konsekuensinya. Pola perencanaan keluarga semacam ini memastikan terjadinya pewarisan kemiskinan karena generasi yang semestinya dapat memutus rantai kemiskinan tersebut, justru tidak dipersiapkan masa depannya. Keadaan seperti ini bila tidak dicarikan solusinya segera tentu bisa mengancam kualitas generasi muda mendatang yang pada gilirannya dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Gambaran kronis kemiskinan tersebut tampak pada gambar di bawah di mana keluarga miskin ini memiliki 5 orang anak (Foto 2).



Foto 2. Potret keluarga miskin di Kabupaten Karangasem (Foto: Dokumen Kumbara, 2022).

Seperti tampak dalam Foto 2, kemiskinan ekonomi yang dihadapi oleh para warga miskin memberikan efek terjadinya perencanaan keluarga yang kurang mempertimbangkan masa depan anak. Alih-alih membentuk generasi baru yang mampu keluar dari jerat kemiskinan, justru beban yang diterima oleh warga miskin semakin berat dengan banyaknya anak. Fakta ini sejalan dengan pendapat Lewis (dalam Tim penyusun, 2013:5) bahwa pada lingkungan masyarakat miskin seringkali muncul sikap masa bodoh dan pasrah terhadap nasibnya sendiri, di mana mereka bersikap pasrah, tidak berusaha membatasi jumlah anak karena mereka tidak peduli dengan masa depan anak seperti yang dianjurkan pemerintah.

4.1.2 Lemahnya Kesadaran Transformatif

Keterpurukan ekonomi yang mendera sejumlah wilayah dan penduduk miskin memang memberikan tantangan besar bagi upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karangasem. Hal ini bahkan menjadikan warga miskin khususnya yang berkategori Desil 1 (Sangat Miskin) nyaris tidak memiliki lagi sumber daya untuk keluar dari kondisi kemiskinannya sehingga berpotensi mewariskan kondisi ini pada generasi selanjutnya. Kondisi ini melahirkan kemiskinan kultural, seperti sikap pasrah pada nasib, nihilnya tabungan, dan lemahnya perencanaan keluarga sebagai efek domino kemiskinan ekonomi yang relatif sulit diputus mata rantainya dalam rangka pengentasan kemiskinan kultural.

Berusaha keluar dari zona nyaman kemiskinan mencerminkan sebuah kesadaran transformatif, yakni kesadaran untuk berubah dari suatu kondisi menuju kondisi yang lebih baik. Menurut *Webster's Dictionary* (1970, p. 1299), bahwa *transformation* berarti *an act, process, or instance of change in structure,*

appearance, or character; a conversion, revolution, makeover, alteration, or renovation ('suatu tindakan, proses, atau hal perubahan struktur, penampilan, atau karakter; sebuah konversi, revolusi, merubah, perubahan, atau renovasi'). Singkatnya, kesadaran transformasi mencerminkan kesadaran untuk berubah melalui suatu proses atau tindakan yang mengarah ke kemajuan.

Bagi penduduk Kabupaten Karangasem yang mengalami keterbatasan sumber daya alam untuk mengakses pekerjaan, maka bekerja ke luar daerah menjadi salah satu cara yang dilakukan. Hingga saat ini, cukup banyak warga Karangasem yang bekerja atau merantau keluar daerah terutama di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Tindakan ini tentu memerlukan keberanian tersendiri karena mereka harus keluar dari zona nyaman. Keberanian dimaksud mencakup keberanian menanggung resiko di rantauan, jauh dari keluarga, kebiasaan sehari-hari, bahkan melepaskan diri dari ikatan tradisi, baik sementara maupun secara permanen. Keberanian keluar dari zona nyaman ini ternyata dapat memberikan efek positif pada sejumlah warga dalam meningkatkan taraf hidup, dibandingkan warga yang masih bertahan di daerah asal. Faktanya bahwa dengan jiwa petarung yang dimiliki menunjukkan cukup banyak warga Karangasem yang sukses di daerah rantau.

Makna di balik itu bahwa keberanian untuk keluar dari zona nyaman dengan mencari pekerjaan di luar daerah adalah salah satu bentuk kesadaran transformatif agar mampu keluar dari kondisi kemiskinan yang dihadapi sebelumnya. Kesadaran transformatif ini telah dilakukan oleh salah seorang informan bernama I Made Regeg dari desa Muntig Gunung yang berhasil ke luar dari lingkaran kemiskinan dengan melakukan transformasi ekonomi dan Pendidikan. Dia berhasil meraih Pendidikan Guru (SPG) dilanjutkan ke jenjang Magister dan sekarang tengah melanjutkan Pendidikan Doktornya. Keberhasilan yang dicapai ini karena keberaniaan keluar dari zona nyaman, dan kesadaran transformatif serta kerja keras.

Kendati demikian, merujuk Laporan Karangasem Dalam Angka 2016, secara umum kesadaran transformatif warga miskin di Kabupaten Karangasem untuk mengubah kehidupannya melalui pendidikan tampaknya masih sangat rendah sehingga kemiskinan kultural sulit diputuskan mata rantainya. Angka Melek Huruf (AMH) penduduk Karangasem yang berusia 10 tahun ke atas sebanyak 15,17% masih buta huruf. Angka Pendidikan yang ditamatkan (APD) menunjukkan 40,10 % penduduk Kabupaten Karangasem berusia 10 tahun ke atas tidak memiliki ijazah. Rendahnya kesadaran transformatif masyarakat terutama dalam bidang pendidikan ini rupanya menjadi persoalan kultural yang sulit dirubah pada diri warga miskin di Kabupaten Karangasem.

Fakta tersebut menegaskan bahwa rendahnya kesadaran transformatif khususnya di bidang pendidikan bagi warga miskin lebih berpusat pada aktor,

dibandingkan struktur meskipun pemerintah telah menyediakan fasilitas dan kemudahan bagi mereka. Kondisi ini bila dikaitkan dengan postulat Teori Strukturasi dapat dipahami bahwa kesulitan struktur (pemerintah) untuk mengubah kesadaran aktor (warga miskin), karena aktor itu telah membangun pemahamannya sendiri tentang pendidikan dan implikasinya bagi kehidupan mereka dalam ranah praksis. Bahwa, mengajak anak untuk ikut menjadi gepeng dipandang lebih menguntungkan dibandingkan dengan menyekolahkan mereka. Pemahaman rasionalitas inilah yang menjadi faktor determinan penghambat proses transformasi pendidikan dalam pengentasan kemiskinan di Karangasem.

4.1.3 Sistem Sosial dan Politik yang Hegemonik

Kemiskinan kultural memang memberikan penekanan yang lebih besar pada aktor, yakni nilai-nilai, sikap, dan perilaku warga miskin yang menyebabkan mereka sulit keluar dari kondisi kemiskinan yang dihadapi. Walaupun demikian, nilai, sikap, dan perilaku tersebut tidak sepenuhnya dibentuk oleh aktor itu sendiri, tetapi juga oleh struktur yang lebih luas, di mana setiap proses sosial senantiasa melibatkan aktor dan struktur yang terintegrasi satu sama lain.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka sistem sosial dan politik yang menjadi ruang kehidupan penduduk miskin sesungguhnya memiliki potensi besar dalam pengentasan kemiskinan kultural di wilayah tersebut. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa sistem sosial dan politik yang berlaku ternyata belum mampu berfungsi maksimal dalam pengentasan kemiskinan sebagaimana terbukti dengan data jumlah penduduk miskin yang masih cukup tinggi. Malahan acap kali ditemukan adanya sistem sosial dan politik tersebut justru kontraproduktif dengan upaya pengentasan kemiskinan kultural itu sendiri.

Dalam sistem adat misalnya, Kabupaten Karangasem dikenal sebagai daerah yang masyarakatnya cukup kuat mempertahankan sistem adat. Berbagai aturan adat kerap dilaksanakan secara ketat dan mengikat seluruh warga (krama) adat tanpa kecuali. Mau tidak mau, warga miskin yang menjadi krama adat juga harus mengikuti aturan-aturan adat tersebut, termasuk berbagai sanksi sosial yang harus ditanggung apabila berani melanggarnya. Bahkan tidak jarang ditemukan aturan-aturan adat yang justru membatasi gerak warganya untuk bekerja, misalnya kewajiban ngayah di pura dan aktivitas pasuka-dukan lainnya. Aturan adat semacam ini selain bersifat mengikat dan memiliki kekuatan memaksa, juga dapat menimbulkan sanksi berupa denda uang dengan nominal yang relatif tinggi, juga sanksi sosial (*kasepekang*) yang setiap warga desa adat akan berusaha menghindarinya. Menurut informan, kondisi semacam ini, bisa terjadi berhari-hari karena kewajiban anggota banjar untuk ngayah dilakukan dalam durasi panjang.

Selain itu, sistem politik yang berlaku juga turut memberikan kontribusi yang tidak kalah penting terhadap terjadinya kemiskinan kultural di hampir seluruh wilayah di Kabupaten Karangasem. Hal ini dapat dicermati pada sistem politik elektoral dan berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tampaknya cenderung menempatkan warga miskin sebagai objek politik, bukan sebagai subjek. Bahwa, dalam sistem politik elektoral kekuasaan politik ditentukan oleh jumlah suara pemilih, maka suara penduduk miskin dipandang cukup penting bagi para politikus. Karena itulah, para politikus seperti berlomba-lomba meraih simpati penduduk miskin dengan memberikan bantuan langsung disertai janji-janji politik yang menggiurkan. Hal ini membangun stigma di masyarakat bahwa tahun politik merupakan waktu yang ditunggu-tunggu oleh para warga miskin karena mereka berharap akan ada banyak kucuran bantuan yang diterima, seperti yang diungkapkan oleh Madia “bahwa setiap ada perhelatan pemilihan kepala daerah dan legislatif kelompok miskin sering dijadikan target perolehan suara dengan cara memberikan berbagai bantuan baik berupa uang, beras atau material bangunan serta janji-janji bantuan lainnya (Wawancara, Juli 2022).

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa tahun politik merupakan waktu yang diharapkan oleh para warga miskin untuk mendapatkan bantuan dari para calon yang berlaga di helatan politik, seperti pemilihan gubernur, bupati, ataupun legislatif dari tingkat kabupaten hingga pusat. Tersirat kesan bahwa mereka sangat senang mendapatkan bantuan dari para politikus tersebut sehingga dengan senang hati menunjukkan tingkat keparahan kemiskinannya. Mengingat semakin mereka terlihat miskin dan memerlukan bantuan, maka terbuka peluang bagi mereka untuk mendapatkan bantuan yang lebih besar. Dengan sistem politik elektoral ini menciptakan simbiosis yang seolah-olah saling menguntungkan antara politikus dan penduduk miskin. Politikus diuntungkan oleh keberadaan warga miskin untuk membangun citra diri mereka di kalangan pemilik suara, sebaliknya warga miskin juga diuntungkan dengan bantuan yang diterima.

4.1.4 Disorientasi Tradisi Keagamaan

Keberagaman masyarakat miskin yang beragama Hindu di wilayah Desa Tianyar sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan umat Hindu di daerah lain. Mereka melaksanakan aktivitas sosioreligius dalam ikatan genealogis, seperti di pura panti dan dadia; ikatan kewilayahan, seperti di banjar dan desa adat; ikatan profesi (swagina), seperti subak dan melanting; dan juga pengamalan keagamaan secara individu di rumah masing-masing. Berbagai bentuk ritual panca yadnya juga dilaksanakan, baik sehari-hari, rutin maupun berkala. Begitu pula dengan sejumlah ritual (upacara) yang bersifat unik dan spesifik

juga masih dipertahankan sampai sekarang dengan biaya yang relatif besar.

Fakta tersebut menunjukkan terjadinya disorientasi tradisi keagamaan terutama jika dilihat dari aspek kemampuan sang pelaksana upacara. Mengingat dalam agama Hindu terdapat ajaran *nista*, *madya*, *utama* yang mengatur tingkatan yadnya berdasarkan kemampuan. Namun, lemahnya pemahaman keagamaan juga melahirkan disorientasi di kalangan warga miskin yang menjadikan upacara keagamaan sebagai arena hiburan. Salah satunya adalah kebiasaan warga miskin mengupah *joged bumbung*, bahkan musik dangdut saat melaksanakan upacara perkawinan di beberapa desa kantong kemiskinan di Kecamatan Kubu (Foto 3).



Foto 3. Pementasan *joged bumbung* saat pesta perkawinan (Foto: dokumen Kumbara, 2020).

Bagi warga miskin yang tinggal di wilayah pedesaan dan jauh dari pusat-pusat hiburan serta tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan hiburan, tentu kehadiran hiburan seperti *joged bumbung* dan musik dangdut tersebut cukup dinantikan. Oleh karena itu, upacara keagamaan terutama perkawinan dianggap tepat untuk menghadirkan momen tersebut karena identik dengan upacara bersuka-cita. Selain menjadi hiburan yang dekat dan gratis bagi warga sekitar, juga hiburan ini dapat dibarengi dengan aktivitas pemuasan hasrat lainnya, misalnya minum-minuman keras. Pada akhirnya, momen-momen ini hadir secara berulang-ulang dan membentuk sub-budaya (kebiasaan-kebiasaan) yang mendorong terjadinya kemiskinan kultural. Mengingat kebiasaan semacam ini akan meningkatkan pengeluaran warga miskin, padahal untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja sulit.

Pemanfaatan upacara keagamaan sebagai arena pemuasan hasrat jelas menunjukkan terjadinya disorientasi tradisi keagamaan dalam berbagai aspeknya. Pada satu sisi, pelaksanaan upacara keagamaan disertai aktivitas yang bernuansa pemuasan libidinal seperti joget bumbung, juga yang berdekatan dengan tindakan kriminalitas, seperti minum-minuman keras tentu bertentangan dengan substansi kesakralan upacara itu sendiri. Secara ekonomi, juga kebiasaan semacam itu akan menambah beban pengeluaran dalam pelaksanaan upacara keagamaan karena dipandang sebagai kelengkapan upacara yang mesti disediakan.

Salah satu dampak nyata dari pelaksanaan upacara-upacara besar (karya agung) terhadap kemiskinan kultural adalah peningkatan jumlah pengemis dari Muntigunung, Desa Tianyar Barat. Menurut Juliawan (dalam Tribun Bali, Juni 2018), jumlah warga Muntigunung yang mengemis ke kota meningkat menjelang pelaksanaan karya agung di desa yang memerlukan biaya banyak. Penghasilan dari membuat kerajinan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari saja tidak cukup sehingga mereka pergi mengemis. Seminggu bisa membawa pulang uang antara Rp1 juta sampai Rp3 juta (Tribunnews, 2018). Bila data ini benar, maka tindakan mengemis itu merupakan pilihan yang paling rasional bagi warga miskin untuk memenuhi kewajiban keagamaannya, di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang mereka hadapi.

Pada sisi yang lain, penyelenggaraan upacara kolektif di tingkat banjar atau desa pakraman juga tidak jarang disertai dengan penyelenggaraan perjudian, khususnya tajan dan maceki di mana aktivitas perjudian tersebut mendapatkan respons yang luar biasa dari masyarakat. Disorientasi tradisi keagamaan ini rupanya memperoleh legitimasi dari sistem sosial sehingga warga miskin mendapatkan arena untuk meluapkan kegemarannya dalam berjudi. Dengan kata lain, disorientasi tradisi keagamaan turut memberikan sumbangan dalam pelestarian kemiskinan kultural umat Hindu di Kabupaten Karangasem.

4.2 Model Pemberdayaan Struktur dan Agen dalam Penanggulangan Kemiskinan Kultural

4.2.1 Pemberdayaan Kemiskinan Berdasarkan Perpres No. 15 Tahun 2010

Kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 Tahun 2010. Berdasarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tersebut dalam kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah daerah tingkat satu dan pemerintah kabupaten khususnya di Kabupaten Karangasem telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan *Nawa Satya Darma*, Kabupaten Karangasem meliputi: (1) Meningkatkan Program Perlindungan Sosial; (2)

Meningkatkan Akses terhadap pelayanan dasar; (3) Pemberdayaan Kelompok masyarakat miskin dan (4) Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Adapun strategi penanggulangan kemiskinan mencakup: (1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (3) Membangun dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil dan (4) Membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Program kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Karangasem tersebut sejalan dengan tujuan diterbitkannya Perpres Nomor 15 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin untuk meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Mengacu pada kebijakan dan strategi tersebut, program-program yang dilaksanakan untuk menangani masalah kemiskinan di Kabupaten Karangasem termasuk di wilayah Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) klaster, sebagai berikut.

Klaster pertama adalah Program Berbasis Individu, Keluarga, dan Rumah Tangga kategori Program Nasional, antara lain: (1) Program Keluarga Harapan (PKH); (2) Penyaluran Raskin; (3) Program Bedah Rumah; (4) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (5) Program Indonesia Pintar (PIP); (6) Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (7) Program Keaksaraan Dasar (Pemberantasan Buta Huruf); (8) Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)/ Pendidikan keterampilan; (9) Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM)/ Pendidikan Keterampilan Lanjutan. Sementara itu, kategori Program Daerah mencakup: (1) Program Bedah Rumah; (2) Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara; (3) Program Bea Siswa Miskin; (4) Keaksaraan Dasar (Pemberantasan Buta Huruf); dan (5) Pendidikan Kecakapan Hidup/Pendidikan Keterampilan.

Klaster kedua, adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas kategori Program Nasional antara lain: (1) Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) Pedesaan; (2) Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) Perkotaan; (3) Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Ekonomi. Sementara itu, kategori Program Daerah antara lain: (1) Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) Pedesaan; (2) Program Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri); (3) Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu); (4) Program *Community Based Development* (CBD).

Klaster ketiga adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Usaha Mikro dan Kecil kategori Program Nasional, yaitu Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), sedangkan kategori Program Daerah, yakni Program Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida).

Klaster Keempat, adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Usaha Mikro dan Kecil kategori Program Nasional/Daerah antara lain: (1) Penyediaan Air bersih; (2) Peningkatan Infrastruktur; (3) Pembuatan Jalan Produksi; (4) Sanitasi; (5) Penyediaan Transportasi Murah; (6) Pelatihan Keterampilan; dan (7) Bursa Kerja *Online*.

Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi terhadap empat klaster program penanggulangan kemiskinan di Desa Tianyar Barat bahwa program tersebut belum sepenuhnya berhasil sesuai dengan target ideal yang ditetapkan. Malah beberapa program menjadi kontraproduktif dan menguatkan budaya kemiskinan yang ditandai dengan banyaknya keluarga miskin yang memiliki sikap dan perilaku ketergantungan pada bantuan pihak luar, etos kerja lemah, pasrah dengan keadaan, pragmatis dengan cara menjadi *pengepeng* untuk memperoleh uang secara instan, dan mengalami disorientasi sosial maupun tradisi keagamaan.

4.2.2 Model Pemberdayaan Penanggulangan Kemiskinan Kultural

Secara operasional model pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karangasem, di wilayah Desa Tianyar Barat, Tianyar Tengah, dan Tianyar Timur secara umum dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni pemberian bantuan langsung dan tidak langsung berupa pemberdayaan masyarakat miskin dengan model pelibatan masyarakat dalam proyek padat karya. Pemberian bantuan langsung berupa program bedah rumah, raskin, jaminan kesehatan, dan bantuan beasiswa pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran warga miskin. Sebaliknya, program pemberdayaan bertujuan memberdayakan potensi warga miskin sehingga mereka bisa hidup mandiri dengan melibatkan mereka dalam proyek pembangunan sarana dan prasarana milik pemerintah kabupaten maupun desa melalui proyek padat karya. Akan tetapi, realitas di lapangan juga menunjukkan bahwa berbagai bantuan yang terkategori bantuan langsung, acapkali justru membuat warga miskin memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap bantuan pemerintah. Ketergantungan ini tidak jarang malah melemahkan etos kerja warga miskin karena berharap akan terus mendapatkan bantuan pemerintah, jika mereka tetap menjadi warga miskin.

Hubungan antara ketergantungan dan melemahnya etos kerja ini dapat dilihat dari berbagai kegagalan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam program pemberdayaan untuk penanggulangan kemiskinan

di Desa Tianyar Barat, seperti disampaikan Wayan Budha (wawancara, Juli 2022) berikut ini.

“Sebetulnya jika dibandingkan dengan memberikan bantuan langsung kepada warga miskin, pemberdayaan warga miskin sebenarnya akan jauh lebih bermanfaat. Sebab kalau bantuan langsung, paling dinikmati hanya sesaat dan setelah itu habis mereka tetap miskin lagi. Namun kendalanya, upaya pemberdayaan itu malah sering gagal. Misalnya, kalau mereka kami berikan bibit sapi atau babi, terkadang belum sampai sebulan bibit itu sudah mereka jual. Umumnya alasannya karena mati. Jadi, persoalannya di sini bukan karena pemerintah tidak tanggap dan berusaha, tetapi mental masyarakat miskin di sini yang sulit diubah.”

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat miskin di wilayah ini kerap mengalami kegagalan karena lemahnya etos kerja masyarakat miskin itu sendiri. Salah satu indikasinya bahwa bantuan modal berupa hewan ternak yang seharusnya dapat diberdayakan, justru kerap dijual sebelum berkembang biak. Seolah-olah warga miskin memandang bantuan modal tersebut sama seperti bantuan langsung lainnya yang dapat dinikmati secara instan, tanpa perlu bekerja lagi. Bahkan, menurut informasi aparat desa di wilayah ini, tidak hanya bantuan langsung itu kerap bermasalah, tetapi yang lebih parah lagi dimana bantuan biasiswa pendidikan (untuk bayar SPP dan membeli pakaian sekolah anak) ada yang diambil oleh bapaknya dipakai untuk berjudi. Atas kejadian ini maka kepala sekolah mengambil kebijakan, bahwa bantuan biaya pendidikan yang disimpan di bank atau LPD tertentu, hanya bisa diambil oleh siswa bersangkutan.

Berbagai bentuk program pemerintah Kabupaten Karangasem untuk menanggulangi kemiskinan, secara umum di samping dirasakan manfaatnya oleh golongan miskin walaupun untuk waktu sesaat, tetapi di pihak lain justru menciptakan kemiskinan kultural, yaitu munculnya sikap ketergantungan pada bantuan pemerintah dan donatur lain dan menciptakan sikap pasrah terhadap keadaan serta lemahnya etos kerja masyarakat. Atas realitas tersebut, untuk penanggulangan jangka panjang maka upaya menemukan strategi model perbedaan struktur dan agen dapat menjadi alternatif yang relevan.

5. Simpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan di atas dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut.

Pertama, determinan yang menyebabkan terjadinya kemiskinan kultural di Desa Tianyar Barat, yaitu (a) adanya efek domino kemiskinan natural dan ekonomi, (b) rendahnya kesadaran transformatif, (c) hegemoni sistem sosial dan politik; dan (d) terjadinya disorientasi tradisi keagamaan. Secara parsial dan simultan, keempat aspek tersebut membentuk tata nilai, sikap, dan perilaku warga miskin di wilayah Desa Tianyar, yang menghambat mereka untuk keluar dari kondisi kemiskinan yang dialaminya.

Kedua, model pemberdayaan struktur dan agen dalam menanggulangi kemiskinan kultural di Desa Tianyar Barat, dilakukan dengan dua cara, yakni berupa pemberian bantuan langsung kepada target sasaran dan bantuan tidak langsung. Bantuan langsung berupa pemberian uang tunai (BLT) dan bantuan bahan makanan untuk masyarakat yang terkategori miskin. Bantuan tidak langsung diberikan kepada masyarakat (keluarga miskin) dengan melibatkan mereka dalam proyek padat karya pembangunan sarana dan prasarana milik pemerintah, baik di tingkat desa maupun kabupaten.

Model pemberdayaan ini dinilai cukup berhasil menanggulangi kemiskinan untuk jangka pendek, tetapi tidak efektif untuk model jangka panjang, dan bahkan cenderung dinilai kontraproduktif. Karena itu pengembangan model pemberdayaan struktur dan agen dengan pendekatan kultural dapat menjadi alternatif, berdasarkan potensi sumber daya yang dimiliki, kebutuhan, keinginan, dan kepentingan masyarakat secara partisipatif. Melaksanakan program pengembangan kompetensi agen pemberdayaan berbasis potensi struktur sosial dan nilai adat yang dimiliki oleh masyarakat setempat dan bekerja sama dengan pemerintah. Secara operasional, pemberdayaan dapat dimulai dengan pendidikan keagamaan sejak dini pada keluarga-keluarga miskin.

Pemberdayaan pada struktur dan budaya dapat dilakukan dengan penguatan dan penerapan lebih ketat potensi aturan adat dan budaya yang sudah ada untuk menanggulangi kemiskinan sekaligus mencegah berkembangnya budaya kemiskinan (seperti tradisi meminta-minta, nyaman dengan kondisi miskin, ketergantungan dan pasrah terhadap keadaan). Dalam setiap upaya pemberdayaan tersebut seyogyanya dilakukan monitoring dan evaluasi dengan model *learning by doing* secara reflektif dan berkelanjutan. Penelitian ini mengutamakan pendekatan kualitatif sehingga kurang dukungan data kuantitatif untuk menguatkan analisis penelitian. Atas dasar kelemahan tersebut perlu dilakukan studi lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada narasumber, informan, dan pihak LPPM Universitas Udayana yang telah membantu memfasilitasi dalam

penyelesaian penelitian ini, dan kepada tim *Jurnal Kajian Bali* yang sudah bersedia menerbitkan hasil penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Adhi, K.M, Ardana, I.K, dan Maduriana, I.M. (2016). “Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan Kultural dan Model Pengentasannya Berbasis Kearifan Lokal: Studi Pada Masyarakat Miskin di Pegunungan Kintamani, Bangli”. *Jurnal Kajian Bali* Vol. 06, No. 02, Oktober 2016, pp. 229-246.
- Afifuddin, H., dan Beni, A,S. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ancok, D. (1995). “Pemanfaatan Organisasi Lokal” dalam *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia* (ed). Amien Rais. Yogyakarta: Aditya Media.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Barker, C. (2005). *Culture Studies Teori dan Praktik*. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka.
- Black. J. A. dan Dean J. C. (2001). *Metode Dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: Pt Refika Aditama.
- Bogdan, H.R. and Biklen.S.K. (1982). *Qualitative Research for Education, An Introduction to theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Effendi, T.N. (1992). “Tinjauan Kritis Konsep Kebudayaan Kemiskinan” dalam *Dinamika Ekonomi dan IPTEK dalam Pembangunan*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Culture*. New York: Basic Books.
- Giddens, A. (2010). *Teori Strukturasi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Hadiwigeno, S. Pakpahan, A. (1993). *Identifikasi wilayah miskin di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Hariato, S. (2014). “Strukturisasi Kemiskinan Masyarakat Pedesaan: Studi di Desa Mulyodadi, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur”. *Disertasi*. Malang: Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.
- Kumbara, A.A.N.A. (2023). *Teori-Teori Budaya Kontemporer*. Nyoman Darma Putra & Nanang Sutrisno (ed). Denpasar: Sari Kahyangan Indonesia.
- Lewis, O. (1988). *Kisah Lima Keluarga: Telaah-telaah Kasus Orang Meksiko dalam Kebudayaan Kemiskinan*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Lewis, O. (1996). *The Culture of Poverty*, dalam G. Gmelch dan W. Zenner, (eds). *Urban Life*. Waveland Press.

- Lubis, A.Y. (2015). *Teori dan Metodologi: Ilmu Pengetahuan Sosial Budaya Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Madison, D. S. (2012). *Critical Ethnography: Method, Ethics, and Performance*, 2nd ed. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications.
- Miles, M.B. and Huberman. A. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. (1996). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Nawawi, H. (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazrina, Z. (2020). "Sosio-Agrikultur Bali untuk Gastronomi Berkelanjutan di Indonesia", *Jurnal Kajian Bali*, Vol. 10, No. 02, Oktober 2020, pp 627-650
- Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan penanggulangan Kemiskinan.
- Philip, H.M, & Richard, L.G. (1981). *Displacement: How to Fight it, The Study of Urbanization*. New York: Wiley.
- Pidada, I.B. (2017). *Kemiskinan Kultural Umat Hindu di Kabupaten Karangasem*. Disertasi Universitas Hindu Indonesia, Denpasar.
- Ritzer, G & Goodman, D. J. (2004). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Sudiarta, I.N., Suardana, I. W. (2016). "Dampak Pariwisata Terhadap Kemiskinan di Kawasan Pariwisata di Bali" dalam *Jurnal Kajian Bali Vol. 06, No. 02, Oktober 2016*, pp. 209-228.
- Sudibia, I.K dan Marheni, AA I.N. (2012). "Beberapa Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali" dalam *Jurnal Piramida Vol. IX. No.1: 1-14*.
- Suparlan, P. (1984). "*Kemiskinan di Perkotaan*" bacaan untuk Antropologi Perkotaan. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Suprayogo, I. T. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tim Penyusun. (2013). *Meminimalisasi Kemiskinan Kultural di Kabupaten Karangasem*. Amlapura : Bagian Kesra Setda Kabupaten Karangasem.
- Thompson, J.B. (2015). *Kritik Ideologi Global* (Yaqin, H., Penerj). IRCiSoD.
- TribunNews. (2018). (<http://bali.tribunnews.com/2018/02/06/perbeker-blak-blakan-soal-warga-munti-gunung-mengemis-agung-ada-faktor-kutukan-dewi-danu? page=2>, diakses 2 Juli 2022).

Profil Penulis

A A Ngurah Anom Kumbara adalah dosen senior dan Guru Besar bidang Epistemologi Antropologi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Di samping mengajar mahasiswa S1,S2,S3 di Fakultas Ilmu Budaya, juga di beberapa program studi magister dan doktor Pascasarjana Universitas Udayana. Menekuni bidang antropologi kesehatan, sosial politik, pariwisata dan lingkungan. Telah menulis 4 buah buku referensi bidang antropologi dan kajian budaya serta sejumlah artikel di jurnal nasional terakreditasi Sinta dan jurnal internasional bereputasi. Email: anom_kumbara@unud.ac.id.

Mayske Rinny Liando adalah dosen senior Fakultas Ilmu Bahasa Universitas Negeri Manado. Menyelesaikan studi doktor bidang Kajian Budaya di Pascasarjana Universitas Udayana tahun 2015. Mengajar mahasiswa program sarjana S1, S2, dan S3 bidang Bahasa Indonesia di Unima. Bidang riset yang digeluti adalah budaya politik, bahasa dan tradisi lisan. Email: mayske_liando@unima.ac.id.

Nanang Sutrisno adalah dosen Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Menyelesaikan studi doktoral bidang Agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia tahun 2016. Telah menulis beberapa buku dan jurnal ilmiah bidang agama dan budaya. Email: sutrisno@unud.ac.id.